



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Tunggakan PBB-P2 Hambat Pembangunan

**PELABAI** - Para camat, lurah dan kepala desa se Kabupaten Lebong diingatkan agar lebih proaktif memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun ini. Penegeasan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si lantaran kurang maksimalnya pemungutan PBB-P2 tahun 2019 hingga tidak mencapai target. Ia menilai ini semua tidak lepas dari sikap acuh atau kurang maksimalnya kerja perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan penagihan.

"Bagaimana pemerintah hendak membayarkan pos belanja jika pos

harus benar-benar sesuai objek pajak yang ada.

"Harus ditelaah juga apakah tidak pernah tercapainya target PBB-P2 itu memang karena banyak wajib pajak yang tidak taat atau karena faktor lain. Misalnya target yang terlalu besar karena tidak sesuai jumlah objek pajak. Kalau memungkinkan, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, red) langsung diserahkan ke wajib pajaknya," tukas Sekda.

Sementara Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak mengaku pihaknya

pendapatan tersendat mengingat belanja daerah juga sangat bergantung kepada PAD (pendapatan asli daerah, red) yang salah satunya diperoleh melalui pos pajak daerah," ujar Sekda.

Bahkan dikatakannya, defisit anggaran hingga Rp 48 miliar di struktur APBD 2019 juga diakibatkan pajak yang menunggak. Baik PBB-P2 maupun pajak lainnya seperti galian C dan reklame. Dimintanya, Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) benar-benar maksimal dalam memotori pemungutan PBB-P2. Termasuk dalam penetapan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), jumlahnya

saat ini masih melakukan pendataan jumlah Objek Pajak (OP) di 93 desa dan 11 kelurahan yang ada di Lebong. Ditargetnya, April DHKP dan SPPT sudah dibagikan ke masing-masing wajib pajak.

"Selain mengejar pungutan PBB-P2 tahun ini, kami juga berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat membantu kami menagih tunggakan PBB-P2 enam tahun terakhir. Terhitung 2014-2019. Nilai piutang PBB-P2 itu akan kami sampaikan langsung kepada masing-masing camat, kepala desa dan lurah berbarengan saat penyerahan DHKP dan SPPT," tandas Rudi.(sca)